Kemenkes
BBPK Jakarta

RENCANA AKSI KEGIATAN 2020 - 2024

REVIEW 3



Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Balai besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta

(021) 7657625

bbpkjakarta-nakes.kemkes.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Review 3 Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta di Tahun 2024. Rencana Aksi Kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi organisasi dalam menjalankan kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun, periode tahun 2020 – 2024.

RAK dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintah dalam tahun berjalan yang dapat dijadikan pedoman dalam penetapan rencana kinerja, rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi. Rencana kinerja selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, yang ditandatangani diawal periode sebagai komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Rencana kegiatan selanjutnya dituangkan dalam dokumen anggaran, sebagai salah satu pedoman dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapat target kinerja. Dokumen ini juga akan dituangkan dalam instrumen pemantauan, yang akan digunakan secara periodik untuk menilai capaian kinerja secara valid, akurat dan transparan. Dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja yang telah dicapai diakhir tahun, yaitu penilaian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah.

Namun demikian, penyusunan RAK BBPK Jakarta ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam hal pencantuman data dan informasi. Kami terbuka untuk koreksi dan masukan terhadap dokumen ini dalam rangka penyempurnaan RAK ini.

Jakarta, 23 Desember 2024
Kepala,

Dr. Sugiyanto, S.Pd., M.App.,Sc.
NIP. 196607221989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN **1**

a. Latar Belakang Organisasi 1

b. Sejarah BBPK Jakarta 2

c. Landasan Hukum Organisasi 3

d. Visi BBPK Jakarta 4

e. Misi BBPK Jakarta 4

f. Tujuan 5

g. Nilai – nilai 5

h. Motto 5

i. Logo 5

BAB II ARAH KEBIJAKAN **6**

a. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Nakes 6

b. Arah Kebijakan dan Strategi BBPK Jakarta 6

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS **8**

a. Faktor Eksternal 8

1) Regulasi 8

2) Segmen Pasar (Pengguna) 9

3) Kompetitor 9

4) Supplier 9

5) Stakeholders Lain 10

6) Produk Subsitusi 12

7) Faktor Lingkungan Eksternal Lainnya 13

b. Faktor Internal 13

1) Aktivitas Utama 13

2) Aktivitas Pendukung 13

c. Analisis SWOT 14

1) Kekuatan

2) Kelemahan

3) Peluang
4) Ancaman
d. Asumsi – asumsi 32
e. Kegiatan Strategis 32
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI 33
a. Strategi Pengembangan 33
b. Sasaran 33
c. Indikator Kinerja 34
d. Target Tahunan 39
BAB V KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN 43
a. Matriks Rencana Kinerja 48
b. Matriks Rencana Anggaran 58
BAB VI SIMPULAN DAN MONITORING 64
a. Simpulan 64
b. Monitoring dan Evaluasi 64
c. Merencanakan Monitoring dan Evaluasi 65
d. Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi 66
e. Rencana Monitoring 67
f. Rencana Evaluasi 67
g. Sumber Daya Untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi 67
h. Pelibatan Stakeholders untuk Monitoring dan Evaluasi 67
i. Instrumen untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi 68
BAB VII PENUTUP 73
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ORGANISASI

Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, disebutkan bahwa pembangunan Kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN_ 2005 – 2025), sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020 – 2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN (Kementerian Kesehatan, 2020).

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program – program pembangunan Kesehatan yang akan dilaksanakan Kementerian Kesehatan dan jajarannya dengan mendorong peran aktif masyarakat. Renstra Kemenkes merupakan acuan bagi Kemenkes dalam penyelenggaraan program pembangunan Kesehatan termasuk didalamnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing. Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes) Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen implementasi Renstra Kemenkes di bidang pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Kesehatan. Semua kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM Kesehatan mengacu pada RAP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (Ditkat Mutu Nakes) Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen implementasi RAP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang berfokus kepada peningkatan kompetensi SDM Kesehatan.

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan.

Landasan hukum yang mendukung perlunya pelatihan termaktub dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 49 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 210 dan 212, yang menyatakan bahwa Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan dan/atau Pelatihan, Seminar, Kursus dan/atau Penataran.

Perencanaan kegiatan pengembangan program pelatihan di BBPK Jakarta dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang mengacu pada Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (RAK) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. RAK BBPK Jakarta Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman implementasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT), untuk mendukung Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

B. SEJARAH BBPK JAKARTA

BBPK Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Berdirinya BBPK Jakarta merupakan proses sejarah yang panjang, dimulai dengan berdirinya Kursus Tambahan Bidan (KTB) pada tahun 1960 – 1970 yang berlokasi di Jalan Fatmawati. Berturut – turut KTB berganti nama menjadi Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat Nasional (PLKMN) yang berlokasi di daerah Dapur

Susu Jalan Wijaya Kusuma, kemudian berbah lagi menjadi Balai Latihan Kesehatan Masyarakat pada tahun 1976.

Berdasarkan hasil analisis jabatan di lingkungan Balai Diklat Kesehatan, maka ditetapkan SK Menteri Kesehatan Nomor : 911/Menkes/SK/X/1993 tanggal 20 Oktober 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Kesehatan, maka BLKM Cilandak berubah menjadi Bapelkes CIlandak dengan klasifikasi A. berdasarkan SK tersebut, maka secara administrative, Bapelkes Cilandak merupakan UPT Pusdiklat Kesehatan. Sembilan tahun kemudian, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 556/Menkes/SK/VI/2002, Bapelkes Cilandak menjadi UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan secara administrated, walaupun secara teknis tetap menjadi UPT Pusdiklat SDM Kesehatan.

Pada tanggal 29 Mei 2006, dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 382A/Menkes/Per/V/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak, berdasarkan peraturan tersebut, nama Bapelkes Cilandak secara resmi telah berubaj menjadi BBPK Cilandak. Permenkes ini menjadi tonggak berdirinya BBPK Cilandak dengan organisasi dan tata kerja yang baru. BBPK Cilandak merupakan UPT di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan,

Dalam rangka pengembangan fungsi pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional di bidang Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan dan masyarakat serta tugas pengembangan kemitraan dan jejaring diperlukan akses terhadap sistem informasi yang memudahkan pengenalan kedudukan BBPK yang berada di ibukota Republik Indonesia, yaitu Jakarta. Oleh karena itu, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 704/MENKES/SK/VIII/2009, nama BBPK Cilandak berubah menjadi BBPK Jakarta. Nama ini yang kemudian digunakan hingga saat ini.

C. LANDASAN HUKUM ORGANISASI

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
6. Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
7. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

D. VISI BBPK JAKARTA

BBPK Jakarta menjadi balai pelatihan yang unggul dalam menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.

E. MISI BBPK JAKARTA

1. Menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan standar mutu akreditasi baik nasional maupun internasional
2. Mengembangkan sistem pembelajaran, metode dan teknologi sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola *corporate university*.

3. Mengembangkan *networking* ditingkat pusat dan daerah secara nasional maupun internasional.

F. TUJUAN BBPK Jakarta

Menciptakan SDM Kesehatan yang professional dan kompeten untuk mencapai manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.

G. NILAI – NILAI

Nilai – nilai BBPK Jakarta adalah BerAKHLAK

Berorientasi pelayanan

Akuntabel

Kompeten

Harmonis

Loyal

Adaptif

Kolaboratif

H. MOTTO

Motto BBPK Jakarta adalah :

"Diklat Berkualitas SDM Cerdas"

I. LOGO

Memasuki tahun 2024, BBPK Jakarta menyesuaikan logo berdasarkan Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan, sehingga BBPK Jakarta telah menerapkan logo sesuai pedoman tersebut dengan bentuk logo sebagai berikut :

Kemenkes
BBPK Jakarta

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan maka ditetapkan tujuan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024 yaitu **Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan**.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan programnya selama 5 (lima) tahun dari tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
3. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPK JAKARTA

Arah Kebijakan BBPK Jakarta:

1. Melaksanakan transformasi penyelenggaraan pelatihan dari *training* menjadi *learning*
2. Melaksanakan digitalisasi proses *learning* melalui pengembangan *networking*

Strategi BBPK Jakarta:

Dalam mendukung sasaran strategi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, BBPK Jakarta sebagai sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan jenis pelatihan
2. Peningkatan mutu dan pelatihan melalui akreditasi institusi dan akreditasi pelatihan
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelolaan pelatihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
4. Peningkatan jumlah dan jenis sarana prasarana pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi
5. Pengembangan sistem teknologi informasi dalam semua jenis pelayanan di BBPK Jakarta
6. Optimalisasi peran mitra dan jejaring kerja

BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS

A. FAKTOR EKSTERNAL

1) REGULASI

Pada Tahun 2023, Organisasi dan Tata Kerja BBPK Jakarta mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Mengacu Permenkes tersebut, pada pasal nomor 5 BBPK Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan. Adapun fungsi BBPK Jakarta adalah menyelenggarakan:

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional dan pelatihan unggulan tertentu;
c. Pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional dan pelatihan unggulan tertentu;
d. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional dan pelatihan unggulan tertentu;
e. Pelaksanaan uji kompetensi;
f. Pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional dan pelatihan unggulan tertentu;
g. Pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional dan pelatihan unggulan tertentu;
h. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional dan pelatihan unggulan tertentu;

i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
j. Pelaksanaan urusan administrasi UPT bidang pelatihan kesehatan.

2) SEGMEN PASAR

Adalah kelompok – kelompok sasaran yang memiliki kebutuhan dan karakeristik yang berbeda.

- Tenaga Kesehatan;
- Tenaga Non Kesehatan;
- Struktural dan manajemen;
- Unit – unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Kementerian/Lembaga;
- TNI - Polri;
- Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga;
- Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Rumah Sakit Provinsi, Kabupaten/Kota,
- Rumah Sakit / Klinik Swasta;
- Puskesmas;
- Perguruan Tinggi;
- Masyarakat (Organisasi Masyarakat/Organisasi Profesi Kesehatan);
- Perusahaan swasta.

3) KOMPETITOR

Kompetitor BBPK Jakarta adalah unit diklat yang sudah mendapatkan akreditasi dan menyelenggarakan pelatihan sejenis.

4) *SUPPLIER*

Supplier adalah Pemasok yang mendukung penyelenggaraan pelatihan berupa produk dan jasa.

a. Unit-unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. Kementerian/Lembaga;
c. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga;
d. Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
e. Rumah Sakit Provinsi, Kabupaten/Kota,
f. Rumah Sakit/Klinik Swasta;
g. Puskesmas;
h. Perguruan Tinggi;
i. TNI-Polri;
j. Organisasi Profesi;
k. Masyarakat (Organisasi Masyarakat);
l. Perusahaan swasta.

5) STAKEHOLDERS LAIN

Menurut ISO 26000 SR, *stakeholder* didefinisikan “Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi” sedangkan menurut standar pengelolaan *stakeholder* AA1000 SES, definisinya adalah ”Kelompok yang dapat mempengaruhi dan/atau terpengaruh oleh aktivitas, produk atau layanan”.

Stakeholder adalah (1) pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan adalah semua pihak, baik masyarakat, individu atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap BBPK Jakarta (2) bagian penting dari BBPK Jakarta yang memiliki peran aktif maupun pasif untuk mengembangkan tujuan.

Adapun *stakeholder* atau pemangku kepentingan BBPK Jakarta terdiri dari:

1. Manajemen: Kepala BBPK Jakarta, pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas;
2. Jabatan fungsional tertentu dan umum;
3. Pegawai Pemeritah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
4. Unit utama di lingkungan Kemenkes;

5. Dinkes Provinsi di wilayah mitra BBPK Jakarta (Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimatan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur);
6. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah mitra BBPK Jakarta;
7. Unit Pelatihan Kesehatan Daerah di wilayah mitra BBPK Jakarta;
8. Politeknik Kesehatan di wilayah mitra BBPK Jakarta;
9. Dinkes Provinsi Jawa Barat;
10. Dinkes Kota Tasikmalaya;
11. Dinkes Kota Depok;
12. Puskesmas lokus praktik lapangan;
13. Kementerian Keuangan RI;
14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN);
16. Kemenko Bidang Perekonomian RI;
17. Kemenko Bidang Kemaritiman RI;
18. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
19. Kementerian Luar Negeri RI;
20. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
21. Kementerian Pemuda dan olahraga RI;
22. Kementerian BUMN RI;
23. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
24. Kementerian Pertanian;
25. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
28. Badan POM;
29. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
30. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

31. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI;
32. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
33. Ombudsman RI;
34. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI);
35. Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes) Kodiklat TNI AD;
36. Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes);
37. *Nanyang Technology University of Singapore;*
38. *Instituto Nacional Da Saude* (*INS*) Timor Leste.

Selain Stakeholder tersebut, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK.02.02/IV/16011/2020 tentang Wilayah Kemitraan Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Bidang Kesehatan, BBPK Jakarta dan Bapelkes semarang memiliki 10 Provinsi wilayah mitra yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Untuk pembagian wilayah Adapun dalam pembagian wilayah tersebut BBPK Jakarta bekerjasama dengan Bapelkes Semarang.

6) PRODUK SUBSITUSI

Produk substitusi di BBPK Jakarta:

a. *In House Training;*
b. Lokakarya;
c. *Workshop;*
d. Seminar;
e. Magang;
f. Studi Banding;
g. *Capacity Building;*
h. Jasa penggunaan sarana prasarana;
i. Sarasehan.

7) FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL LAINNYA

Faktor lingkungan eskternal lainnya di BBPK Jakarta adalah:

a. Lokasi strategis di Daerah Khusus Jakarta;
b. Kemudahan akses (transportasi dan informasi);
c. Dekat dengan sarana fasilitas pelayanan Kesehatan;
d. Dekat dengan pusat hiburan.

B. FAKTOR INTERNAL

1) AKTIVITAS UTAMA

Aktivitas utama BBPK Jakarta adalah penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut :

a. Pelatihan Manajemen
b. Pelatihan Teknis Kesehatan
c. Pelatihan Teknis Non Kesehatan ;
d. Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan
e. pelaksanaan kerjasama di bidang pelatihan sumber daya manusia Kesehatan
f. penyelenggaraan kerjasama internasional di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan;

2) AKTIVITAS PENDUKUNG

a. penyusunan rencana, program dan anggaran
b. pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan sumber daya manusia kesehatan
c. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan kesehatan
d. pengelolaan sistem informasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan;

g. Pengembangan SDM (*capacity building*; pelatihan, kursus, seminar, *workshop,* magang);
h. Pengembangan sarana prasarana;
i. Pengembangan Laboratorium Lapangan;
j. Kegiatan kemasyarakatan dan *Social supporting activities*
k. Pengembangan dukungan manajemen melalui *e-Office, Health Safety Environment* dan Ramah Kebudayaan;
l. Kegiatan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

C. ANALISIS SWOT

Analisis lingkungan yang ada di BBPK Jakarta dilakukan menggunakan metode *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan memperhatikan strategi BBPK Jakarta, meliputi:

1. Jumlah, jenis, dan mutu pelatihan;
2. Sumber daya manusia pengelolaan pelatihan ;
3. Sarana prasarana pelatihan;
4. Sistem teknologi informasi.

Tabel 3.1

Analisis SWOT

No	Faktor	Kekuatan *(Strength)*	Kelemahan *(Weakness)*	Peluang *(Opportunity)*	Ancaman *(Threats)*
1	Jumlah, jenis, dan mutu pelatihan	1) Mendapatkan predikat WBK dari Kemenpan RB pada 12 Desember 2017 2) Memperoleh penghargaan Satker Terbaik I dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN TA 2017 kategori Pagu DIPA Sedang; 3) Memperoleh peringkat ketiga Kategori	1) Belum semua kurikulum dan modul pelatihan dimiliki/tersedia 2) Hasil TNA belum diakomodir dalam program pelatihan	1) Adanya UU ASN yang menyatakan pelatihan sebagai hak dari setiap PNS 2) Adanya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mewajibkan ASN mengikuti diklat minimal 20	1) Inkonsistensi antara RAP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan RAK Ditkat Mutu Nakes dengan pelaksanaan pelatihan. 2) Semakin banyaknya lembaga diklat swasta yang menyelenggarakan

		Kepatuhan Pelaporan Program/Kegiatan PPSDM Kesehatan Kantor Pusat dan Daerah Tahun 2017 berdasarkan *Electronic Monitoring and Evaluation* (*e-Monev*); 4) Memperoleh penghargaan sebagai Satker dengan kategori Pagu Sedang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Kedua Tahun 2018;		Jpl dalam setahun 3) Adanya PP No. 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kemenkes 4) Mempunyai jejaring lintas sektor dan lintas program 5) Kebutuhan pengembangan IT di era globalisasi	pelatihan teknis kesehatan 3) Program pelatihan *top down* dari Ditkat Mutu Nakes 4) Belum ada kebijakan tentang pengakuan pengampuan program pelatihan sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama) 5) Kebijakan pengampuan pelatihan yang belum jelas

		5) Terakreditasi ***A*** oleh LAN untuk Pelatihan Dasar CPNS 6) Sebagai tempat *benchmark* untuk pelatihan *TOC* dan *MOT* yang dilaksanakan oleh LAN; 7) Terakreditasi dan mendapatkan sertifikat untuk Akreditasi Institusi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Ditjen Tenaga Kesehatan Nomor: HK.02.02/II/7360/2019		6) Tuntutan perkembangan teknologi dan metodologi pelatihan 7) Kebutuhan Reformasi Birokrasi di bidang pelatihan 8) Jenis pelatihan yang beragam untuk tenaga kesehatan dan masyarakat 9) Komitmen pemerintah untuk pengembangan	

		tanggal 23 Oktober 2019; 8) Tersertifikasi ISO 9001: 2015 untuk Pelatihan Kepemimpinan, teknik manajemen dan fungsional; 9) Menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan terakreditasi LAN dengan Nomor: 782/K.1/PDP.09/2019 10) Mendapatkan sertifikat dari		SDM Kesehatan dan masyarakat 10) Mengembangkan program pelatihan di wilayah kemitraan 11) Kebutuhan sertifkasi kompetensi untuk tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan 12) Banyaknya permintaan dari LAN dan Kementerian/	

		Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 709/K.I/PDP.09/2018 tanggal 15 November 2018 dengan kategori: ● Akreditasi A untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ● Akreditasi A untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III 11) Tersertifikasi sebagai tempat uji kompetensi tenaga keperawatan;		Lembaga untuk kerjasama penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dan Diklatpim 13) Adanya kebutuhan Widyaiswara untuk mengembangkan kompetensi melalui TOF dan TOT	

		12) Memperoleh penghargaan peringkat II Satker dengan predikat Berhias dari Kementerian Kesehatan. 13) Sebagai Tempat Uji Kompetensi Sesaat bagi Penyuluh Anti Korupsi yang dilaksanakan bekerjasama dengan KPK; 14) Mempunyai visi dan misi organisasi			

		15) Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pemberian pelayanan yang dituangkan dalam Nilai-Nilai Organisasi. 16) Mempunyai program diklat unggulan di bidang: ● Sentra Pelatihan Gender Bidang Kesehatan ● Pelatihan Kepemimpinan Kesehatan			

		17) Adanya wilayah kemitraan di 12 propinsi (Banten, DKI Jakarta, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Jateng, Jatim, DIY, NTB, dan NTT) sebagai *captive market*			
2	Sumber daya manusia pengelolaan pelatihan	1) Sebanyak 93,75% Widyaiswara mempunyai Pendidikan S2. 2) Sebanyak 1 orang Widyaiswara mempunyai Pendidikan S3	1) Belum tersedianya sistem informasi yang berisi tentang kualifikasi dan spesifikasi tenaga	1) Adanya kesempatan bagi seluruh komponen BBPK Jakarta untuk mengikuti Ibel, Tubel dan Pelatihan	1) Banyaknya permintaan pengampuan dari unit utama, profesi, swasta yang berdampak

		3) Terpenuhinya kualifikasi semua Widyaiswara yang dibuktikan dengan sertifikat TOF, TOT dan TPPK 4) Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas untuk semua komponen SDM BBPK Jakarta 5) Sebanyak 31 orang dari 99 (31,31%) pegawai BBPK Jakarta yang berpendidikan minimal S1 6) Memiliki tenaga kediklatan/pelatihan dan non pelatihan yang kompeten di bidangnya,	kediklatan (diklat dan non diklat); 2) Strategi pengembangan SDM belum didukung *grand strategy;* 3) Kompetensi Widyaiswara belum disesuaikan dengan rumpun pelatihan; 4) Belum ada sumber daya manusia dengan	2) Meningkatnya kebutuhan aparatur dan tenaga kesehatan yang professional melalui diklat penjenjangan, pelatihan teknis dan pelatihan fungsional 3) Adanya peluang kerjasama dengan unit pembina pelatihan (LAN) dan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.	pada *performance* mengajar SDM internal. 2) Jumlah tenaga yang berkurang (pensiun, pindah, cuti di luar tanggungan negara) 3) Pengusulan rekruitmen pegawai tidak terpenuhi

		dibuktikan dengan adanya sertifikat MOT, TOC, dan TOT 7) Standar minimal kebutuhan SDM terpenuhi	kompetensi tenaga *programmer* 5) Belum diterapkannya kebijakan penghitungan kelebihan jam mengajar 6) Beban kerja semua jenjang widyaiswara masih disamakan 7) Belum punya *grand design* dan pemetaan pengembangan SDM	4) Adanya rekruitmen CPNS	

			8) Pemahaman tentang uraian tugas di masing-masing komponen SDM BBPK Jakarta masih berbeda-beda		
3	Sarana prasarana pelatihan	1) Memiliki auditorium dua lantai (di Kampus Cilandak dan Kampus Hang Jebat) dengan kapasitas masing-masing 200 orang. 2) Memiliki kendaraan operasional: 1 unit station wagon, 9 unit	1) Belum memaksimalkan kapasitas laboratorium lapangan; 2) Instalasi listrik di Kampus Hang Jebat belum tertata dengan baik;	1) Adanya anggaran pemerintah (APBN) untuk pemenuhan sarana prasarana 2) Pemanfaatan auditorium, laboratorium pembelajaran dan fasilitas pelatihan lainnya untuk	1) Kurangnya anggaran APBN untuk pengadaan sarana prasarana 2) Jaringan komunikasi tidak stabil

		micro bus dan 3 unit sepeda motor; 3) Memiliki 1 unit ambulans yang menunjang kegiatan pelatihan; 4) Memiliki fasilitas asrama yang berkapasitas 366 orang di lokasi Kampus Cilandak dan Kampus Hang Jebat; 5) Memiliki Perjanjian Kerjasama Laboratorium Lapangan dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Kota Depok	3) Kuantitas AVA dalam kelas masih belum memadai 4) Instrumen monitoring dan pemeliharaan AVA (*sound system*, *lasser pointer*, baterai, *microphone*) belum dimanfaatkan secara maksimal	penyelenggaraan pelatihan oleh pihak ketiga (K/L/Swasta/ OP/dll) cukup tinggi. 3) Adanya komitmen Kemenkes untuk pemenuhan sarana prasarana sesuai peraturan yang berlaku. 4) Adanya Peraturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan dan Permenkes	

		dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten; 6) Memiliki perpustakaan yang dilengkapi *e-library* dengan nama E-Puskata; 7) Memiliki 7 ruang kelas di Kampus Cilandak dan 8 ruang kelas di Kampus Hang Jebat, masing-masing dengan kapasitas 30 – 40 orang; 8) Memiliki 10 ruang rapat berkapasitas @ 10 - 15 orang, yang berlokasi di Kampus Cilandak dan Kampus Hang Jebat.		Nomor 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan	

		9) Memiliki ruang transit fasilitator yang dapat difungsikan sebagai ruang rapat dengan kapasitas 10 - 15 orang; 10) Memiliki 2 ruang makan di Kampus Cilandak dan 1 ruang makan di Kampus Hang Jebat dengan kapasitas masing-masing 100 orang; 11) Memiliki 2 unit ruang menyusui *(Nursery Room)* 12) Memiliki ruang P3K 13) Memiliki 1 ruang rumah singgah			

		14) Memiliki 2 ruang *room in* 15) Memiliki 2 unit masjid 16) Memiliki 2 unit Kamar Belajar Mandiri 17) Memiliki 2 unit kamar khusus *difable* 18) Memiliki 4 unit kamar VIP 19) Memiliki kantor yang ramah lingkungan 20) Memiliki sarana olahraga: lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, basket, tenis, *volley*, bilyard, tenis meja, *fitness center* dan sepeda.			

		21) Memiliki sarana pemeriksaan kesehatan berupa tensimeter digital, masing-masing 1 unit di Kampus Cilandak dan Hang Jebat. dan alat test gula darah, kolesterol, asam urat mobile			
4	Sistem teknologi informasi	1) Memiliki jaringan internet dengan kapasitas bandwith sebesar 250Mbps di Kampus Cilandak dan 200Mbps di Kampus Hang Jebat	1) *Skill,* pengetahuan dan perilaku SDM untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi masih belum maksimal;	1) Perkembangan teknologi dan metodologi kediklatan	1) Kompetitor memanfaatkan sistem teknologi dan informasi lebih cepat dan lebih canggih .

		2) Telah memiliki *e-office* yang difungsikan sesuai dengan Permenkes Nomor 21 Tahun 2018; 3) Tersedianya sistem informasi untuk proses pelatihan (LMS Pintar, Silatjak dan Website) 4) Tersedianya sistem informasi untuk penjaminan mutu (SiAksiJak)			

D. ASUMSI – ASUMSI

1. Perluasan paradigma pengembangan kompetensi SDM
2. Digitalisasi proses bisnis organisasi dalam pengembangan kompetensi SDM
3. Peningkatan kompetitor institusi pengembangan SDM

E. KEGIATAN STRATEGIS

Berdasarkan lingkungan strategis tersebut diatas dan memperhatikan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, maka kegiatan strategis yang diangkat dalam Rencana Aksi Kegiatan BBPK Jakarta tahun 2020 – 2024 Review 3 yaitu:

1. Mendukung pengembangan *grand strategy* SDM Kesehatan menuju *corporate university*;
2. Pengembangan sistem informasi mengikuti perkembangan revolusi industri untuk peningkatan kompetensi SDM Kesehatan.

BAB IV
STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI

A. STRATEGI PENGEMBANGAN

Strategi BBPK Jakarta disusun sebagai tahapan pencapaian tujuan BBPK Jakarta. Tujuan BBPK Jakarta diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Strategi BBPK Jakarta pada rentang waktu 2020 – 2024, yaitu:

1. Mendukung program nasional, dengan mengakomodir perubahan kebijakan, situasi dan kondisi bangsa dan negara namun tetap tersedia alokasi untuk melaksanakan program unggulan melalui Optimalisasi RM dan PNBP;
2. Melakukan adaptasi dan perkembangan kekinian mengikuti situasi intenasional;
3. Mendukung pengembangan *grand strategy* SDM Kesehatan menuju *corporate university*;
4. Mengembangkan struktur dan infrastruktur yang akan dengan perkembangan teknologi dan kompetensi SDM;
5. Meningkatkan akses dan manfaat produk BBPK Jakarta melalui marketing publik.

B. SASARAN

Mengacu kepada Sasaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020 – 2024, BBPK Jakarta melakukan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah Pelatihan Rumpun Teknis Program Kesehatan, Pelatihan Rumpun Teknis Profesi Kesehatan, Pelatihan Rumpun Teknis Umum, Pelatihan Rumpun Fungsional Kesehatan, Pelatihan Rumpun Manajemen Umum, Pelatihan 9 Penyakit Prioritas, Pelatihan Sistem Ketahanan Nasional, Pelatihan Stunting, Manajemen terakreditasi dan Dukungan Manajemen Pelatihan Kesehatan.

C. INDIKATOR KINERJA

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, BBPK Jakarta menyelenggarakan Kegiatan pelatihan dengan sasaran kegiatan tercapainya pelaksanaan pelatihan yang bermutu. Indikator kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan

Tabel 4.1

Proyeksi Pelatihan sistem ketahanan nasional

No	Nama Pelatihan	Peserta
1	Pelatihan Pelayanan Darah di Unit Transfusi Darah Bagi ATLM	75
2	Pelatihan Pelayanan Darah di Unit Transfusi Darah Bagi Perawat	75
3	Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual di Puskesmas	315
4	Pelatihan Gizi Bencana	150

b. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas

Tabel 4.2

Proyeksi Pelatihan 9 penyakit prioritas dan stunting

No	Nama Pelatihan	Peserta
1	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Akupresur di Puskesmas	90
2	Pelatihan Pelayanan Paliatif Kanker	120
3	Pelatihan Pengelolaan Diabetes Melitus bagi Dokter	60

	dan Perawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	
4	Pelatihan Asuhan Gizi pada Pasien Dewasa Penyakit Ginjal Kronik (PGK) dengan Pre-Dialisis dan Hemodialisis bagi Dietisien/ Nutrisionis di RS	90
5	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60
6	Pelatihan Laboratorium Tubercolosis dan Implementasi Penggunaan Tes Cepat Molekuler di Puskesmas	60
7	Pelatihan Penanggulangan Tuberculosis (TB) Bagi Petugas Kesehatan di Fasyankes Tingkat Pertama (FKTP)	60
8	Pelatihan Pemeriksaan Tuberkulosis Menggunakan Alat Tes Cepat Molekuler (TCM) bagi Tenaga Laboratorium di Fasilitas Kesehatan	60
9	Pelatihan Asuhan Keperawatan Stroke Komprehensif bagi Perawat di Rumah Sakit	50
10	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	120
11	Pelatihan Imunisasi bagi Pengelola Program Imunisasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30
12	Pelatihan SDIDTK dan Pemberian Makan pada Balita dan Anak Prasekolah	100
13	Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak	150
14	Pelatihan Konseling Menyusui	100
15	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Gizi Buruk	150
16	Komunikasi Antar Pribadi (KAP) bagi Nakes di Puskesmas dalam Percepatan Pencegahan Stunting	180
17	Pelatihan Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Stunting	30

c. Jumlah SDM Kesehatan dan non Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi.

Tabel 4.3

Proyeksi Pelatihan

No	Nama Pelatihan	Peserta
1	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60
2	Tenaga Kesehatan Haji Indonesia Embarkasi Jakarta	189
3	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran resposive Gender	60
4	Pelatihan Pengarustamaan Gender Bidang Kesehatan	30
5	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri untuk Petugas Puskesmas	60
6	Pelatihan Pencegahan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Melalui Peningkatan Keterampilan	60
7	Pelatihan Pelayanan Kefarmasian bagi Apoteker di Puskesmas	60
8	Pelatihan Pengembangan Video Pembelajaran bagi tenaga pelatih	60
9	Pelatihan Pengembangan Media Presentasi Bagi SDM Kesehatan	90
10	Leadership Course	124
11	Pelatihan Bagi Manajer Pelatihan Bidang Kesehatan	30
12	Pelatihan Pengembangan Kapasitas Bagi Kepala BBPK dan Bapelkes/ Pelatihan TPK	30
13	Pelatihan Manajemen Puskesmas (PNBP)	90
14	Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PTM) di FKTP (PNBP)	30
15	Pelatihan Pengelola Imunisasi di Puskesmas (PNBP)	30

No	Nama Pelatihan	Peserta
16	Pelatihan Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	120
17	Pelatihan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	30
18	Pelatihan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut (PNBP)	60
19	Pelatihan Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (PNBP)	60
20	Training of Trainer Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Mulut	30
21	Training of Trainer Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional	60
22	Training of Trainer Pelayanan Akupresur bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas	60
23	Pelatihan Pengendali Pelatihan	60
24	Pelatihan Coaching dan Mentoring	60
25	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PNBP)	90
26	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PNBP)	40
27	Pelatihan Pelayanan Darah di Unit Transfusi Darah Bagi ATLM	75
28	Pelatihan Pelayanan Darah di Unit Transfusi Darah Bagi Perawat	75
29	Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual di Puskesmas	315
30	Pelatihan Gizi Bencana	150
31	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Akupresur di Puskesmas	90
32	Pelatihan Pelayanan Paliatif Kanker	120
33	Pelatihan Pengelolaan Diabetes Melitus bagi Dokter dan Perawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	60

No	Nama Pelatihan	Peserta
34	Pelatihan Asuhan Gizi pada Pasien Dewasa Penyakit Ginjal Kronik (PGK) dengan Pre-Dialisis dan Hemodialisis bagi Dietisien/ Nutrisionis di RS	90
35	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60
36	Pelatihan Laboratorium Tubercolosis dan Implementasi Penggunaan Tes Cepat Molekuler di Puskesmas	60
37	Pelatihan Penanggulangan Tuberculosis (TB) Bagi Petugas Kesehatan di Fasyankes Tingkat Pertama (FKTP)	60
38	Pelatihan Pemeriksaan Tuberkulosis Menggunakan Alat Tes Cepat Molekuler (TCM) bagi Tenaga Laboratorium di Fasilitas Kesehatan	60
39	Pelatihan Asuhan Keperawatan Stroke Komprehensif bagi Perawat di Rumah Sakit	50
40	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	120
41	Pelatihan Imunisasi bagi Pengelola Program Imunisasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30
42	Pelatihan SDIDTK dan Pemberian Makan pada Balita dan Anak Prasekolah	100
43	Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak	150
44	Pelatihan Konseling Menyusui	100
45	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Gizi Buruk	150
46	Komunikasi Antar Pribadi (KAP) bagi Nakes di Puskesmas dalam Percepatan Pencegahan Stunting	180
47	Pelatihan Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Stunting	30

No	Nama Pelatihan	Peserta
48	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	60
49	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	30
50	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	30

d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

D. TARGET TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan merupakan kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator dan target per tahun. Oleh karena itu, substansi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja. BBPK Jakarta merancang dan menyusun RKT berdasarkan indikator kinerja tahun 2020 – 2024. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan tahun 2020 – 2024, maka diperlukan proyeksi – proyeksi antara lain:

1. Proyeksi Kebutuhan SDM (ditambahkan table pengembangan SDM)

Kebutuhan SDM di BBPK Jakarta dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Proyeksi Kebutuhan SDM Tahun 2020 – 2024

No	Kebutuhan SDM	Tahun				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	PNS	6	6	4	6	6
2	P3K	3	1	2	2	3
	Jumlah	**9**	**7**	**6**	**8**	**9**

Total kebutuhan SDM BBPK Jakarta dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 adalah sebanyak 28 orang PNS dan 11 orang P3K.

2. **Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana** Kebutuhan peralatan untuk mendukung kinerja BBPK Jakarta tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Proyeksi Kebutuhan Peralatan

No	Kebutuhan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Alat ABMM	5 unit	10 unit	10 unit	-	-
2	Alat studio	3 unit	-	-	-	-
3	Laptop	25 unit	-	15 unit	10 unit	-
4	Peralatan Rumah Tangga	10 unit	5 unit	10 unit	-	-
5	Alat Kesehatan Umum	-	10 unit	-	-	-
6	Alat Komunikasi	-	2 unit	-	-	-
7	Alat Kantor	-	10 unit	5 unit	-	-
8	Alat Angkut	-	-	-	2 unit	-
9	Alat Laboratorium	-	-	30 unit	-	-
10	Alat Informasi	-	-	10 unit	5 unit	-
11	Alat Kebersihan	-	-	5 unit	-	-

Tabel 4.9

Proyeksi Detil Kebutuhan Peralatan

No	Kebutuhan	Peralatan
1	Alat ABMM	peralatan kebutuhan ABBM seperti Focusing Screen LCD Projector, Lemari Penyimpanan, Printer, PC Unit, Microphone Table Wireless, Audio Amplifier, Camera Webinar, Camera Digital, LCD TV, LED Videotron
2	Alat studio	Kamera Camcoder, Telepromter, Clip on microphone, Standing Lightning, Layar Monitor, PC Unit, Audio Mixer, Tripod Camera, Speaker Aktif
3	Peralatan Rumah Tangga	AC, Alat Pemanas Air, AC Portable, Pompa Air, CCTV, Accu Genset
4	Alat Komunikasi	kebutuhan tablet seluler untuk kelancaran sistem Dumas dan berita di Instalasi Pemasaran
5	Alat Kantor	Scanner, Printer Portable,
6	Alat Angkut	Kendaraan mobil dinas
7	Alat Informasi	LCD Signage, Videotron Taman

3. Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Subsistem Pendukung

Kebutuhan untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran jarak jauh berupa ruang studio, laboratorium simulasi pembelajaran (secara virtual), penerapan *green office*, dan *layout* / perencanaan tata letak ruangan. Sedangkan pengembangan subsistem pendukung untuk kegiatan dan proses pembelajaran jarak jauh antara lain *website, Learning Management System* (LMS) dan perangkat lunak yang dibutuhkan.

Kebutuhan pengembangan Subsistem Pendukung kinerja BBPK Jakarta tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10

Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Subsistem Pendukung

No	Kebutuhan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ruang Studio	2 unit	4 unit	-	4 unit	-
2	Laboratorium simulasi pembelajaran	-	2 unit	-	-	-
3	Green Office	2 unit	-	-	-	-
4	Pengembangan Website	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
5	LMS	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

Tabel 4.11

Proyeksi Detil Kebutuhan Pengembangan Subsistem Pendukung

No	Kebutuhan	Sarana
1	Ruang Studio	Penambahan ruang studio mini untuk menunjang pelatihan *Blended Learning*
2	Laboratorium simulasi pembelajaran	Penambahan ruang Laboratorium simulasi pembelajaran untuk menunjang pelatihan yang membutuhkan latihan praktik
3	Green Office	Penggunaan google drive sebagai sarana pemberkasan mendukung *paperless*
4	Pengembangan Website dan LMS	Penambahan fitur *bridging* bagi peserta yang mendaftar pada Silatjak bisa langsung masuk ke LMS Pintar untuk mengikuti Pelatihan dan penarikan data nilai peserta yang sinkron dengan data Peserta di Silatjak.

BAB V
KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
TAHUN 2020 – 2024

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi kepada tujuan dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh BBPK Jakarta dalam kurun waktu 2020 – 2022, sesuai dengan tugas dan fungsi BBPK Jakarta.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka BBPK Jakarta mempunyai target tahunan dari masing – masing indikator sebagai berikut :

a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi adalah jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan SDM Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi. Data diperoleh dari total pelatihan yang bersumber dari Rupiah Murni. Cara menetapkan target adalah berdasarkan baseline data minimal 1 tahun dan berdasarkan alokasi anggaran yang ditentukan Eselon I dan alokasi peserta latih yang ditentukan dari institusi yang diampu.
b. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang bersumber dari PNBP adalah jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan SDM Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi. Data diperoleh dari total pelatihan yang bersumber dari PNBP.
c. Persentase peserta TOT dengan nilai akhir ≥ 80,01 adalah perbandingan peserta TOT yang memperoleh nilai ujian akhir ≥ 80,01 dengan total peserta TOT. penetapan nilai diperoleh dari akumulasi *Pre* dan *Post Test*, hasil ujian komprehensif, nilai *microteaching*, sikap dan

perilaku. Cara menetapkan target berdasarkan baseline data minimal 1 tahun sebelumnya.

d. Persentase peserta pelatihan (latsar dan atau kepemimpinan) dengan nilai akhir ≥ 80,01 adalah perbandingan peserta pelatihan (latsar dan kepemimpinan) yang memperoleh nilai akhir ≥ 80,01 dengan total peserta pelatihan latsar dan kepemimpinan. Formulasi perhitungan sesuai dengan PERKALAN yang berlaku. Cara menetapkan target berdasarkan baseline data minimal 1 tahun sebelumnya.
e. Persentase peserta pelatihan teknis dan fungsional dengan kualifikasi memuaskan adalah perbandingan pelatihan teknis dan fungsional yang memperoleh nilai akhir dengan kualifikasi memuaskan dengan total peserta. Cara menetapkan nilai akhir dengan mengakumulasi penilaian selama proses pembelajaran dan / atau hasil uji komprehesif. Cara menetapkan target berdasarkan baseline data minimal 1 tahun sebelumnya.
f. Persentase widyaiswara yang karya tulis ilmiahnya dipublikasikan adalah perbandingan widyaiswara yang membuat karya tulis telah dipublikasikan dengan total widyaiswara. Data diperoleh dari jumlah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh widyaiswara dan dipublikasikan di media informasi baik cetak maupun online. Cara menetapkan target berdasarkan baseline data minimal 1 tahun sebelumnya dan berdasarkan jumlah widyaiswara yang mempunyai potensi.
g. Prosentasi widyaiswara yang melakukan kajian proses pembelajaran adalah perbandingan widyaiswara yang melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan / proses pembelajaran dengan jumlah total widyaiswara yang menjadi pengendali diklat. Data diperoleh dari laporan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan / proses pembelajaran selama yang bersangkutan menjadi pengendali pelatihan. Cara menetapkan target adalah berdasarkan baseline data minimal 1 tahun sebelumnya dan berdasarkan jumlah widyaiswara.

h. Jumlah modul e-Learning yang disusun adalah modul per mata pelatihan yang disusun oleh masing – masing dengan menggunakan metode *e-learning*.
i. Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta adalah meningkatnya dukungan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BBPK Jakarta dengan kegiatan yang terdiri dari Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, Pengelolaan Kepegawaian, Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan perlengkapan dan pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan, Pengembangan Kompetensi SDM berupa training, workshop, magang, coaching dan mentoring dan Pemeliharaan Sarana Prasarana berdasarkan SIMAK BMN.

Pada tahun 2023, terdapat penyesuaian sasaran dan indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka BBPK Jakarta mempunyai target tahunan dari masing – masing indikator sebagai berikut :

a. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas.
b. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan.
c. Jumlah SDM Kesehatan/non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi diluar pelatihan 9 jenis penyakit dan ketahanan kesehatan.
d. Persentase peserta TOT dengan kualifikasi sekurang-kurangnya memuaskan yang memperoleh nilai akhir ≥ 80,01.
e. Persentase Peserta Pelatihan Dengan Kualifikasi Sekurang-kurangnya Memuaskan.
j. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai melalui capaian 8 indikator pada 1 tahun anggaran yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, belanja Kontraktual, Penyelesaian

Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.

k. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat sesuai dengan PermenPAN-RB nomor 14 tahun 2017. Nilai minimal pada sekurang kurangnya 3 kali survei triwulanan (Maret, Juni, September, Desember)
l. Persentase widyaiswara yang karya tulis ilmiahnya dipublikasikan di media jurnal terakreditasi nasional.
m. Jumlah Pelatihan yang menggunakan model pembelajaran MOOCyang disusun di tahun berjalan.

Pada tahun 2024 terdapat penyesuaian kembali pada sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai surat keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor HK.02.02/F/159/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan, maka BBPK Jakarta mempunyai target tahunan dari masing – masing indikator sebagai berikut:

a. Persentase SDMK yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan (Surveilans dan Sistem Ketahanan Nasional)
b. Persentase SDMK yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-ginjal-hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi) & Pelatihan Stunting.
c. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai melalui capaian 8 indikator pada 1 tahun anggaran yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.
d. Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai Indeks Kepuasan (NIK) berdasarkan hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan

masyarakat. Sesuai dengan permenpan nomor 14 tahun 2017. Nilai minimal pada sekurang kurangnya 3 kali survey triwulanan (Maret, Juni, September, Desember).

e. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh : Jumlah pelatihan klasikal yang dikembangkan menjadi pembelajaran jarak jauh (MOOC, *full online, blended*).
f. Jumlah SDM kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk SDM kesehatan dan non kesehatan pada pelatihan terakreditasi (termasuk pelatihan 9 jenis penyakit dan ketahanan kesehatan).
g. Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi. Cara perhitungan : jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100.
h. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam hasil pemeriksaan semester BPK (HAPSEM BPK). Dan/atau rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap. Cara perhitungan : Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di Tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100%.

Matriks Rencana Kinerja

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Tahun 2020 – 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	TAHUN			TOTAL
				2020	2021	2022	
1	Tercapainya pelaksanaan pelatihan yang bermutu / Pelatihan Sumber daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	Kompilasi jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan SDM Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi setiap tahun dengan sumber dana Rupiah Murni	1.967	3.451	3.625	9.043
		Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang bersumber dari PNBP	Kompilasi jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan SDM yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi setiap tahun dengan sumber dana PNBP	420	390	420	1.230

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	TAHUN			TOTAL
				2020	2021	2022	
		Persentase peserta TOT dengan nilai akhir ≥ 80,01	Jumlah peserta TOT yang memperoleh nilai akhir ≥ 80,01 dibagi total peserta TOT dikalikan 100	70%	70%	75%	72%
		Persentase peserta pelatihan (latsar dan atau kepemimpinan) dengan nilai akhir ≥ 80,01	Jumlah peserta pelatihan (latsar dan atau kepemimpinan) dengan nilai akhir ≥ 80,01 dibagi total peserta pelatihan (latsar dan atau kepemimpinan) dikalikan 100	90%	90%	92%	91%
		Persentase peserta pelatihan teknis dan fungsional dengan kualifikasi memuaskan	Jumlah peserta teknis dan fungsional dengan kualifikasi memuaskan dibagi total peserta teknis dan fungsional dikalikan 100	80%	80%	83%	81%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	TAHUN			TOTAL
				2020	2021	2022	
		Persentase widyaiswara yang karya tulis ilmiahnya dipublikasikan	Jumlah widyaiswara yang karya tulisnya dipublikasikan dibagi jumlah total widyaiswara selama tahun berjalan dikalikan 100	60%	60%	70%	63%
		Prosentasi widyaiswara yang melakukan kajian proses pembelajaran	Jumlah widyaiswara yang melakukan kajian proses pembelajaran dibagi jumlah total widyaiswara pada tahun berjalan dikalikan 100	100%	100%	100%	100%
		Jumlah kurikulum modul *e-Learning* yang disusun	Jumlah modul *e-learning* yang disusun	1 Kurikulum Modul	2 Kurikulum Modul	5 Kurikulum Modul	8 Kurikulum Modul

Matriks Rencana Kinerja

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	TAHUN	TOTAL
				2023	
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk SDM Kesehatan yang menjadi peserta pada pelatihan terakreditasi dalam rangka mendukung sistem ketahanan kesehatan (surveilans)	240	240
		Jumlah SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Sesuai Dengan 9 Penyakit Prioritas	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk SDM Kesehatan yang menjadi peserta pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-ginjal-hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi)	4.800	4.800
2.	Meningkatnya Pemenuhan	Jumlah SDM Kesehatan / Non Kesehatan yang Mendapat	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk SDM Kesehatan/ non	2.040	2.040

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	TAHUN	TOTAL
				2023	
	SDMK sesuai standar	Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi	kesehatan pada pelatihan terakreditasi diluar pelatihan 9 jenis penyakit dan ketahanan kesehatan		
		Persentase Peserta ToT Dengan Kualifikasi Sekurang-kurangnya Memuaskan	Perbandingan peserta TOT yang memperoleh nilai akhir ≥ 80,01 dengan total peserta TOT	90%	90%
		Persentase Peserta Pelatihan Dengan Kualifikasi Sekurang-kurangnya Memuaskan	Perbandingan peserta pelatihan yang memperoleh nilai akhir ≥ 80,01 dengan total peserta pelatihan terakreditasi	90%	90%
3.	Terwujudnya pemberian layanan manajemen dan layanan perkantoran	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang memuat nilai IKPA dan nilai EKA sekurang-kurangnya 75	88%	88%
4.	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan,	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan (NIK) berdasarkan hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan	86	86

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	TAHUN	TOTAL
				2023	
	evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan		masyarakat. Sesuai dengan permenpan nomor 14 tahun 2017. Nilai minimal pada sekurang kurangnya 3 kali survey triwulanan (Maret, Juni, September, Desember).		
		Persentase Widyaiswara yang karya tulis ilmiahnya dipublikasikan	Persentase widyaiswara yang karya tulis ilmiahnya minimal dipublikasikan	70%	70%
		Jumlah MOOC yang disusun	Jumlah Pelatihan yang menggunakan model pembelajaran MOOC yang disusun di tahun berjalan	5 Pelatihan	5 Pelatihan

Matriks Rencana Kinerja

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	TAHUN	TOTAL
				2024	
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	Persentase SDMK yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan (Surveilans dan Sistem Ketahanan Nasional)	98%	98%
		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	Persentase SDMK yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-ginjal-hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi) & Pelatihan Stunting	98%	98%
2.	Terwujudnya pemberian layanan manajemen dan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai melalui capaian 8 indikator pada 1 tahun	90%	89%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	TAHUN	TOTAL
				2024	
	layanan perkantoran		anggaran yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.		
3.	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan (NIK) berdasarkan hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat. Sesuai dengan permenpan nomor 14 tahun 2017. Nilai minimal pada sekurang kurangnya 3 kali survey triwulanan (Maret, Juni, September, Desember).	85	85
		Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	Jumlah Pelatihan yang menggunakan model pembelajaran	5 Pelatihan	5 Pelatihan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	TAHUN	TOTAL
				2024	
			MOOC yang disusun di tahun berjalan		
4.	Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	Jumlah SDM kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk SDM kesehatan dan non kesehatan pada pelatihan terakreditasi (termasuk pelatihan 9 jenis penyakit dan ketahanan kesehatan)	3.918	3.918
5.	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksanaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam hasil pemeriksaan semester BPK (HAPSEM BPK). Dan/atau rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi	95%	95%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	TAHUN	TOTAL
				2024	
			Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap. Cara perhitungan : Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di Tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100%		
		Persentase realisasi anggaran	Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi. Cara perhitungan : jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100.	96%	96%

Matriks Rencana Anggaran

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Tahun 2020 – 2022

(dalam ribuan rupiah)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
			2020	**2021**	**2022**
1	Tercapainya pelaksanaan pelatihan yang bermutu / Pelatihan Sumber daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	20.727.315	21.888.954	24.077.849
		Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang bersumber dari PNBP	4.142.029	4.287.997	
		Persentase peserta TOT dengan nilai akhir ≥ 80,01	1.254.390	6.172.796	6.790.075
		Persentase peserta pelatihan (latsar dan atau kepemimpinan) dengan nilai akhir ≥ 80,01	11.743.306	9.402.598	10.342.857

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
			2020	2021	2022
		Persentase peserta pelatihan teknis dan fungsional dengan kualifikasi memuaskan	11.871.648	16.089.383	17.698.321
		Persentase widyaiswara yang karya tulis ilmiahnya dipublikasikan	175.620	206.288	226.916
		Prosentasi widyaiswara yang melakukan kajian proses pembelajaran	262.800	445.500	490.050
		Jumlah modul *e-Learning* yang disusun	118.400	117.320	129.052
2	Dukungan Manajemen	Kegiatan Ketatausahaan	31.971.034	31.219.128	34.341.040

Matriks Rencana Anggaran

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Tahun 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN
			2023
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan	310.200
		Jumlah SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Sesuai Dengan 9 Penyakit Prioritas	4.073.435
2.	Meningkatnya Pemenuhan SDMK sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan / Non Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi	10.351.090
		Persentase Peserta ToT Dengan Kualifikasi Sekurang-kurangnya Memuaskan	2.285.820
		Persentase Peserta Pelatihan Dengan Kualifikasi Sekurang-kurangnya Memuaskan	10.661.290

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN
			2023
3.	Terwujudnya pemberian layanan manajemen dan layanan perkantoran	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	55.525.991
4.	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-
		Persentase Widyaiswara yang karya tulis ilmiahnya dipublikasikan	30.000
		Jumlah MOOC yang disusun	422.800
5.	Dukungan Manajemen	Kegiatan Ketatausahaan	32.441.254

Matriks Rencana Anggaran

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Tahun 2024

(dalam ribuan rupiah)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024
1.	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	3.725.866
		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	7.701.577
2.	Terwujudnya pemberian layanan manajemen dan layanan perkantoran	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	102.602.116
3.	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-
		Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	484.000
4.	Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	23.545.344

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN
			2024
5.	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksanaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti	-
		Persentase realisasi anggaran	102.602.116
6.	Dukungan Manajemen	Kegiatan Ketatausahaan	31.030.756

BAB VI
SIMPULAN DAN MONITORING

A. SIMPULAN

Rencana Aksi Kegiatan BBPK Jakarta disusun sebagai acuan kegiatan lima tahun kedepan. Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kegiatan ini mengaju pada Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Dalam Menyusun RAK ini melibatkan Subbagian Administrasi Umum, Kelompok Jabatan Fungsional, Tim Kerja dan Instalasi di lingkungan BBPK Jakarta untuk mencapai Visi dan misi BBPK Jakarta, Visi dan misi ini diharapkan dapat mendukung Visi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Dengan telah disusunnya Rencana Aksi Kegiatan BBPK Jakarta tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan BBPK Jakarta.

B. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara terus menerus berdasarkan indicator yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Monitoring mencakup aktifitas dan target yang telah ditetapkan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target

yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

2. Evaluasi

Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kegiatan sudah berjalan cukup waktu. Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap.

Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

C. MERENCANAKAN MONITORING DAN EVALUASI

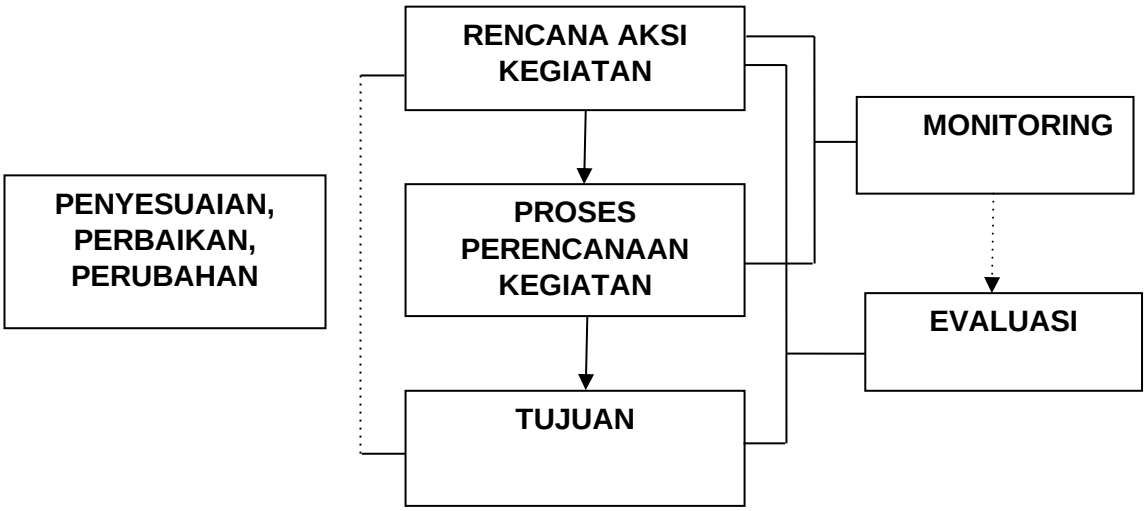
Perencanaan monitoring dan evaluasi BBPK Jakarta dilaksanakan pada pertengahan periode anggaran (*midterm)* dan di akhir periode anggaran (*endterm*).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada pertengahan periode anggaran (*midterm)* dimaksudkan untuk melihat dan mengawal

implementasi RAK dalam perencanaan kegiatan di BBPK Jakarta. Sedangkan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada akhir periode anggaran (*endterm)* untuk mengevaluasi implementasi RAK apakah dalam perencanaan kegiatan sesuai dengan RAK BBPK Jakarta.

D. KERANGKA KERJA MONITORING DAN EVALUASI

Kerangka kerja monitoring dan evaluasi di BBPK Jakarta sebagai berikut:



Keterangan :

- RAK sebagai acuan dalam proses perencanaan kegiatan di BBPK Jakarta
- Proses perencanaan di BBPK Jakarta mengacu kepada RAK yang sudah disusun baik perencanaan kegiatan maupun dalam penganggaran. Hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan BBPK Jakarta dalam rangka mendukung tujuan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- Untuk memastikan tujuan sebagaimana tertera di dalam RAK maka dilakukan minitoring dan evaluasi. Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dengan observasi, wawancara, *Focus Grup Discussion (FGD)* dan sebagainya.

E. RENCANA MONITORING

Rencana kegiatan monitoring sebagai berikut:

No	Kegiatan	BULAN											
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Persiapan	□											
2	Pelaksanaan Monitoring			□			□			□			□

F. RENCANA EVALUASI

Rencana kegiatan evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	BULAN											
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Persiapan	□											
2	Pelaksanaan Evaluasi			□			□			□			□

G. SUMBER DAYA UNTUK MELAKUKAN MONEV

Sumber daya untuk melakukan monitoring dan evaluasi di BBPK Jakarta adalah dengan menggunakan sumber daya yang ada di BBPK Jakarta, yaitu Subbagian Administrasi Umum Kelompok Jabatan Fungsional, Tim Kerja dan Instalasi.

H. PELIBATAN STAKEHOLDERS UNTUK MONEV

Pelibatan *stakeholders* BBPK Jakarta, baik internal maupun eksternal dilibatkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dengan melakukan koordinasi kegiatan dan meminta masukan untuk perbaikan kegiatan.

Koordinasi dengan *stakeholders* dilakukan, baik diawal pelaksanaan, dalam proses pelaksanaan, maupun di akhir pelaksanaan kegiatan untuk evaluasi.

I. INSTRUMEN UNTUK MELAKUKAN MONEV

Instrumen untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi di BBPK Jakarta:

NO	JENIS DOKUMEN	IMPLEMENTASI		KET
		YA	**TIDAK**	
1	Tujuan BBPK Jakarta			
2	Arah kebijakan - Melaksanakan transformasi penyelenggaraan pelatihan dari *training* menjadi *learning* - Melaksanakan digitalisasi proses *learning* melalui pengembangan *networking*			
3	Strategi Pengembangan a. Mendukung program nasional, dengan mengakomodir perubahan kebijakan, situasi dan kondisi bangsa dan negara namun tetap tersedia alokasi untuk melaksanakan program unggulan melalui Optimalisasi RM dan PNBP; b. Melakukan adaptasi dan perkembangan kekinian mengikuti situasi intenasional;			

	c. Mendukung pengembangan *grand strategy* SDM Kesehatan menuju *corporate university*; d. Mengembangkan struktur dan infrastruktur yang akan dengan perkembangan teknologi dan kompetensi SDM; e. Meningkatkan akses dan manfaat produk BBPK Jakarta melalui marketing publik.			
4	Strategi a. Peningkatan jumlah dan jenis pelatihan b. Peningkatan mutu dan pelatihan melalui akreditasi institusi dan akreditasi pelatihan c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelolaan pelatihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya d. Peningkatan jumlah dan jenis sarana prasarana pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi			

	e. Pengembangan sistem teknologi informasi dalam semua jenis pelayanan di BBPK Jakarta f. Optimalisasi peran mitra dan jejaring kerja			
5	Indikator kinerja a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi b. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang bersumber dari PNBP c. Persentase peserta TOT dengan nilai akhir ≥ 80,01 d. Persentase peserta pelatihan (latsar dan atau kepemimpinan) dengan nilai akhir ≥ 80,01 e. Persentase peserta pelatihan teknis dan fungsional dengan kualifikasi memuaskan f. Persentase widyaiswara yang karya tulis ilmiahnya dipublikasikan			

	g. Prosentasi widyaiswara yang melakukan kajian proses pembelajaran h. Jumlah modul e-Learning yang disusun i. Persentase SDMK yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan j. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas k. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) l. Indeks Kepuasan Masyarakat m. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh n. Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi o. Persentase rekomendasi hasil pemeriksanaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti p. Persentase realisasi anggaran			

	q. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.			
6	Penganggaran a. Sumber dana Rupiah Murni b. Sumber dana PNBP			

BAB VII
PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta Tahun 2020 – 2024 Review 1 disusun sebagai acuan kegiatan selama 5 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini disusun Bersama dengan Subbagian Administrasi Umum, Kelompok Jabatan Fungsional, Tim Kerja dan Instalasi untuk mencapai Visi dan Misi BBPK Jakarta. Rencana Aksi Kegiatan BBPK Jakarta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sehingga hasil pencapaiannya dapat mendukung kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. RAK BBPK Jakarta tahun 2020 – 2024 diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan dan penilaian penyelenggaraan kediklatan.

Dengan telah disusunnya Rencana Aksi Kegiatan BBPK Jakarta tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di BBPK Jakarta.

Semoga Rencana Aksi Kegiatan yang telah disusun oleh BBPK Jakarta ini dapat bermanfaat untuk pengembangan organisasi BBPK Jakarta ke depannya dan tentunya RAK ini belum sempurna dan akan direview setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebijakan dari Pusat.